

Nama Formulir:

**Surat Pernyataan  
dan Validasi**

No.

FR-002/PR-003/KB-02-  
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap ROMAITO HASIBUAN

Jenjang S2 \*

Program Studi Magister Ilmu Agama Islam

NIM 22041002

Alamat Katumbangan Lemo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

\* coret yang tidak perlu

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang saya ajukan yaitu:

**POLITIK IDENTITAS DAN KRISIS IDENTITAS TERHADAP PLURALITAS Indonesia**

adalah hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaidah-kaidah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi-sanksi yang dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 22 Agustus 2023  
Yang membuat Pernyataan,



**ROMAITO HASIBUAN**  
NIM: 22041002



Nama Formulir:

**Lembar  
Pengesahan  
Karya Ilmiah**

No. FR-003/PR-003/KB-02-  
01/MMP/UPM/2020

Issue/Revisi

1

Tgl Berlaku

15 Juli 2020

Halaman

1

Yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama Lengkap Dr.Phil. Suratno, M.A  
Jabatan Dosen  
Program Studi Magister Ilmu Agama Islam  
NIP

Telah melakukan penelaahan karya ilmiah berjudul:

***Politik Identitas dan Krisis Ancaman Identitas Terhadap Pluralisme Indonesia***

Dan menyatakan bahwa karya ilmiah tersebut sudah memenuhi kaidah penulisan ilmiah dan oleh karenanya layak diajukan untuk keperluan unggah karya ilmiah di Universitas Paramadina, atas nama:

Nama Lengkap Romaito Hasibuan  
Jenjang S2 \*  
Program Studi Magister Ilmu Agama Islam  
NIM 22041002

Demikian hasil penelaahan atas karya ilmiah ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Jakarta, 22 Agustus 2023

Penelaah,  
Dr. Phil, Suratno, M.A

  
NIP: \_\_\_\_\_

# **POLITIK IDENTITAS DAN KRISIS ANCAMAN IDENTITAS TERHADAP PLURALITAS INDONESIA**

Romaito Hasibuan\* dan Suratno\*\*

\*\*\*Universitas Paramadina, Jl. Gatot Subroto No. Kav. 97 RW. 04. RT 04. Kec Mampang Parapatan, Kota Jakarta Selatan, Email: [romaito.hasibuan@students.paramadina.ac.id](mailto:romaito.hasibuan@students.paramadina.ac.id)

## **Abstrak:**

Indonesia adalah Negara kepulauan yang terluas di muka bumi, jumlah pulauanya lebih 17.000, etnisitas, sub kultur dan bahasa lokalnya ratusan. Dari sisi keragaman budaya (pluralism) ini saja, jika Indonesia bisa bertahan dalam tempo lama, maka menurut saya adalah mukjizat sejarah yang bernilai sangat tinggi. Oleh sebab itu, apa yang bernama politik identitas yang sering muncul permukaan sejarah modernIndonesia harus ditangani dan dikawal secara bijak oleh nalar historis yang yang dipahami secara benar dan cerdas. Saat proklamasi jumlah penduduk Indonesia adalah sekitar 250 juta jiwa, membengkak lebih tiga kali lipat sejak 1945, telah muncul sebagai bangsa terbesar keempat di dunia sesudah cina, india, dan amerika serikat. Dengan masyarakat Indonesia yang terdiri dari beranekaragam etnis, agama, dan budaya yang berbeda-beda, masyarakat Indonesia dapat saling menghargai dan toleransi anatar perbedaan yang ada. Olehkarena itu perlunya menganalisis terjadinya politik identitas di Indonesia.

***Kata kunci: Politik Identitas, Politik Etnis, Politik Agama dan Pluralitas.***

*Indonesia is the largest archipelagic country on Earth, with over 17,000 islands and hundreds of ethnicities, subcultures, and local languages. Just based on this cultural diversity (pluralism) alone, if Indonesia has managed to endure over the long term, I believe it's a historical miracle of significant value. Therefore, what is known as identity politics, which often surfaces in the history of modern Indonesia, should be handled and guided wisely by a historical perspective that is truly and intelligently understood. During the proclamation, Indonesia's population was around 250 million people, ballooning to more than three times that number since 1945, making it the fourth-largest nation in the world after China, India, and the United States. With Indonesian society comprising diverse ethnicities, religions, and cultures, the people of Indonesia can respect and tolerate the existing differences among them. Hence, there's a need to analyze the occurrence of identity politics in Indonesia.*

***Keywords: Identity Politics, Ethnic Politics, Religious Politics, and Pluralism.***

## A. PENDAHULUAN

Di negara yang sangat maju ini hal-hal yang berbau tentang sebuah gagasan demokrasi mungkin sudah tak asing lagi khususnya di Indonesia, yang memiliki ratusan ras, suku, agama dan budaya yang berbeda sehingga melahirkanlah sebuah konsep tentang berdemokrasi. Sejatinya asas dan tujuan demokrasi lahir melalauai daya pikir rakyat yang mempunyai cita-cita bersama demi memajukan sebuah bangsa dan negara yang menjadi tempat tinggalnya di Negara tersebut. Selain itu konsep tentang sebuah demokrasi tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan-kepentingan politik khususnya politik kebangsaan, corak politik kebangsaan adalah sebuah gagasan yang mengangkat tentang kultur beserta budaya dalam mengejawantahkan demokrasi yang lahir di Negara tersebut. Misalkan di Negara-negara barat melekat tentang sebuah demokrasi liberal, maka di Indonesia mempunyai demokrasi yang berasaskan ketuhanan yang maha esa, jelas hal itu sangat membedakan antara demokrasi Indonesia dan demokrasi liberal.

Tapi akhir-akhir ini falsafah demokrasi keindonesiaan sepertinya sedang di uji oleh beberapa kelompok yang sama-sama mempunyai kepentingan masing-masing danada beberapa dari kelompok itu yang menyebarkan Hoak, playing vicktim dan secara tidak langsung berita-berita itu dikonsumsi langsung oleh masyarakat sehingga beberapa masyarakat teracunidengan kejadian itu dan jelas hal ini sangat bertabrakan dengan instrumen Demokrasi kita yang berasaskan undang-undang dasar dan pancasila. Bahkan untuk saat ini politik identitas atau politik kedaerahan telah menyebar luas sampai ke pelosok-pelosok daerah terpencil sekalipun, kita ketahui bahwasanya hal-hal yang berbau etnis, ras, suku sangat mencederai nilai dan falsafah demokrasi kita, karena indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk Republik (lihat pasal 1 ayat 1 UUD 1945). Selain itu Politik identitas tidak bisa diterapkan di Indonesia karena hal itu akan memunculkan beberapa polemik seperti disintegrasi sosial, Rasisme dan merosotnya kultur demokrasi keindonesiaan kita yang sudah terawat hampir berabad-abad lamanya. Identitas hanya berlaku untuk menjunjung kultur dan tradisi, yang ada di Indonesia untuk mewujudkan sebuah sistem masyarakat yang cinta terhadap tanah air, dan identitas tidak bisa dijadikan sebuah perangkat politik demi sebuah kekuasaan.

Dalam sejarah mencatat dampak dari politik identitas ialah sebuah perpecahan dan konflik akibat harus adanya pemurnian "kekitaan" misal lepasnya Pakistan dari India karena pakistan mengklaim bahwa mereka bukan dari bangsa Arya, padahal jika kita telaah bersama pakistan dan India mempunyai sejarah yang sama yaitu sama-sama dijajah oleh bangsa Inggris. Oleh sebab itu dalam kontestasi pemilihan hal-hal yang berbau ras, agama dan suku sebaiknya tidak dipergunakan, karena dikhawatirkan akan menumbuhkan sentimen anti terhadap sebuah golongan, marilah kita rawat kebhinekaan kita dengan memberikan dukungan kepada penyelenggara, pesertadan calon.

Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, apa yang dinamakan identitas tentunya menjadi sesuatu yang sering kita dengar. Terlebih lagi, ini merupakan konsep yang menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal. Kita akan mengenali sesuatu halnya itu kalau kita tahu identitasnya. Ini juga akan berarti bahwa kalau kita mengenali identitas sesuatu hal, maka kita akan memiliki pengetahuan akan sesuatu halnya itu. Politik identitas adalah nama lain dari biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik mendasarkan diri pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Identitas menurut Jeffrey Week adalah berkaitan dengan belonging tentang persamaan dengan sejumlah orang dan apa yang membedakan seseorang dengan yang lain. Pendapat Jeffrey Week tersebut menekankan pentingnya identitas bagi tiap individu maupun bagi suatu kelompok atau komunitas (Widayanti, 2009: 14).

Menyebarnya politik identitas atau biopolitik dalam pandangan Foucault merupakan akibat dari runtuhnya “masyarakat yang direncanakan secara ilmiah” yang merupakan suatu gerakan dengan implementasi kontrol demografis objektif. Inilah dasar-dasar biopolitik. Seorang Foucault merasa diasingkan, disendirikan, dengan cara dibaptis yang memaksanya menyangkut suatu identitas baru sebagai seorang Kristen. Politik identitas merupakan kekhasan yang terjadi pada Negara dan masyarakat modern (liberal dan demokratis), sebagaimana penyelidikan Foucault, untuk menerapkan prinsip-prinsip ilmiah terhadap tubuh individual dalam proses politik melalui kekuasaan negara. Tujuannya adalah agar orang “tercerahkan”:

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode Penelitian ini menggunakan Library Research atau studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan suatu kegiatan yang tidak dapat dipisahkan dari suatu penelitian. Teori-teori yang mendasari masalah dan bidang yang akan diteliti dapat ditemukan dengan melakukan studi kepustakaan. Selain itu seorang peneliti dapat memperoleh informasi tentang penelitian-penelitian sejenis atau yang ada kaitannya dengan penelitiannya. Dan penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Ciri-ciri Politik Identitas**

Ciri khas, yang ada di dalam politik identitas, antara lain adalah sebagai berikut;

Memiliki kesamaan dan tujuan untuk membentuk kekuatan berdasarkan petapolitiknya.

- a. Ketidakpuasan yang muncul dari dalam masyarakat yang merasa terpinggirkan
- b. Memberikan jalur politik sebagai alternatif untuk menyatukan kekuatan dalam rangkaian agenda demokrasinya.

### **2. Jenis Politik Identitas**

Contoh yang dapat diberikan mengenai politik identitas ini antara lain adalah sebagai berikut;

#### **a. Politik Identitas Etnis**

Contoh pertama adalah politik identitas berdasarkan etnis, misalnya saja adanya pemilah kepada daerah yang dilakukan di berbagai wilayah di Indonesia. Meningkatkan kesamaan etnisnya untuk mendulang kemenangan dan kekuatan.

## **b. Politik Identitas Agama**

Contoh mengenai politik identitas agama, misalnya saja dalam terbentuknya PAN (Partai Amanat Nasional) yang didasari atas ketersaingan dengan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Dua paratai ini sama-sama memiliki simbol agama untuk mendulang kekuatan dan kemenangan. Untuk PAN berbasis Muhammadiyah, dan untuk PKB berbasis NU (Nahdlatul Ulama).

## **c. Politik Identitas Gender**

Jenis kelamin dan gender pada saat ini muncul sebagai salah satu politik identitas, misalnya adalah adanya kuota khusus yang dilakukan pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada para wanita berkarir di dunia politik. Tentusaja kondisi ini menjadikan timbulnya politik identitas, dimana kaum perempuan yang selama ini merasa terpinggirkan pada akhirnya bisa bersatu untuk memberikan dukungan dan mengutus keterwakilan perempuan dalam dunia politik.

## **3. Konsep Politik Identitas**

Politik identitas adalah konsep baru dalam ilmu politik. Ini juga dikenal sebagai biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik berkaitan dengan perbedaan yang timbul dari variasi fisik. Walaupun konsep ini telah lama muncul dalam filsafat, penerapannya dalam ilmu politik menjadi signifikan setelah disimposiumkan dalam pertemuan internasional Asosiasi Ilmuan Politik Internasional di Wina pada tahun 1994. Simposium tersebut diabadikan dalam sebuah buku yang diedit oleh Agnes Heller dan Sonja Puntsher Riekman. Pertemuan ini menghasilkan pemahaman tentang dasar-dasar politik identitas sebagai subjek studi dalam ilmu politik. Agnes Heller mendefinisikan politik identitas sebagai gerakan politik yang memusatkan perhatian pada perbedaan sebagai kategori utama. Setelah kegagalan narasi besar, konsep perbedaan menjanjikan kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain, meskipun juga menghadapi ancaman baru. Politik perbedaan menjadi istilah lain untuk politik identitas, termasuk pemikiran tentang ras, biofeminisme, dan konflik etnis yang melahirkan intoleransi baru dan tindakan kekerasan. (Heller, 1995: ix).

## **4. Gagasan Politik Identitas**

Dalam beberapa tahun terakhir, Politik identitas telah menjadi perhatian khusus dalam konteks kebingungan identitas dan eksistensi. Kajian mengenai politik identitas telah berlangsung lama dalam studi pasca-kolonial. Beberapa pemikir terkenal seperti Ania Loomba, Homi K. Bhabha, dan Gayatri C. Spivak sering diacu dalam konteks ini. Kontribusi mereka terletak pada memposisikan politik identitas dalam kerangka sejarah dan budaya. Di bidang literatur ilmu politik, politik identitas dijelaskan secara tegas dalam dua aspek, yaitu identitas politik dan dimensi politik dari identitas. Identitas politik adalah konstruksi yang menetapkan posisi subjek dalam konteks komunitas politik, sementara dimensi politik dari identitas merujuk pada mekanisme politik yang mengatur identitas (baik politik maupun sosial) sebagai sumber dan alat politik.

Interpretasi politik identitas sebagai alat dan strategi dalam perjuangan untuk merebut kekuasaan politik sangat kian muncul dan relevan dalam konteks praktik politik

sehari-hari. Oleh karena itu, para akademisi yang terlibat dalam pembahasan politik identitas berupaya menyederhanakan dan membuatnya lebih operasional. Sebagai contoh, Agnes Heller mengartikan politik identitas sebagai gerakan politik yang memusatkan perhatian pada perbedaan sebagai kategori politik utama. Di sisi lain, Donald L. Morowitz (1998), seorang ahli politik dari Universitas Duke, mendefinisikan bahwa dalam ranah politik lokal, politik identitas berfungsi sebagai penanda yang jelas untuk memutuskan siapa yang diikutsertakan dan siapa yang ditolak. Karena batasan ini sulit diubah, status sebagai anggota atau bukan anggota tampak menjadi permanen. Baik Agnes Heller maupun Donald L. Morowitz menggarisbawahi ide dasar bahwa politik identitas adalah tentang mengakui perbedaan.

Pandangan serupa juga tercermin dalam hasil Simposium Asosiasi Ilmu Politik Internasional yang diadakan di Wina pada tahun 1994. Selain itu, pertemuan ini juga mencetuskan fondasi-fondasi praktik politik identitas. Dalam konteks ini, Kemala Chandakirana (1989) dalam artikelnya "Geertz dan Masalah Kesukuan" mengemukakan bahwa:

“Politik identitas biasanya digunakan oleh para pemimpin sebagai retorika politik dengan sebutan kami bagi “orang asli” yang menghendaki kekuasaan dan mereka bagi “orang pendatang” yang harus melepaskan kekuasaan. Jadi, singkatnya politik identitas sekedar untuk dijadikan alat manipulasi—alat untuk menggalang politik—guna memenuhi kepentingan ekonomi dan politiknya”.

Terlihat bahwa pandangan tentang politik identitas di antara Kemala, Agnes Heller, dan Donald L. Morowitz memiliki perbedaan yang signifikan. Kemala lebih cenderung memfokuskan perhatiannya pada dimensi praktis politik identitas. Menurutnya, politik identitas sering digunakan sebagai alat manipulasi untuk mencapai tujuan ekonomi dan politik, dan menjadi sarana untuk menggalang dukungan politik. Namun, di bagian lain, Kemala juga menunjukkan pandangan yang berbeda dengan mengakui bahwa dalam politik identitas, ikatan kesukuan memiliki peran penting. Ikatan ini menjadi simbol-simbol budaya yang memiliki potensi dan menjadi sumber kekuatan untuk tindakan politik. Pandangan ini berimplikasi pada keinginan untuk memperoleh pengakuan yang setara dan perlakuan yang adil dalam hal hak-hak manusia, baik dalam aspek politik, ekonomi, maupun sosial-budaya.

Dengan demikian, pandangan Kemala mencakup dua aspek yang berbeda, yaitu manipulasi politik identitas untuk tujuan tertentu serta pengakuan dan perlindungan hak-hak dalam kerangka identitas kesukuan. Ini menunjukkan kompleksitas dan beragamnya cara pandang terhadap politik identitas. Kedua, demi menjaga dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan. Terakhir, kesetiaan yang kuat terhadap etnisitas yang dimilikinya. Selain tiga kecenderungan di atas Klaus Von Beyme (dalam Ubai Abdillah, 2002) menyebutkan ada tiga karakteristik yang melekat pada politik identitas, yakni; Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali “narasi besar” yang prinsipnya mereka tolak Sebagai suatu konsep yang sangat mendasar, apa yang dinamakan identitas tentunya menjadi sesuatu yang sering kita dengar. Terlebih lagi, ini

merupakan konsep yang menjadi basis untuk pengenalan sesuatu hal. Kita akan mengenali sesuatu halnya itu kalau kita tahu identitasnya. Ini juga akan berarti bahwa kalau kita mengenali identitas sesuatu hal, maka kita akan memiliki pengetahuan akan sesuatu halnya itu.

Klaus Von Beyme melakukan analisis tentang karakter gerakan identitas dalam beberapa tahap perkembangannya, mulai dari pramodern hingga postmodern. Perpecahan fundamental dan munculnya kelompok-kelompok berdasarkan identitas suku dan kebangsaan memicu gerakan politik yang luas. Tahap pramodern melibatkan mobilisasi ideologis oleh pemimpin untuk merebut kekuasaan dari penguasa yang ada. Pada tahap modern, gerakan identitas cenderung berkembang dengan pendekatan kondisional, di mana mobilisasi sumber daya diperlukan untuk mengatasi fragmentasi. Terjadi keseimbangan antara mobilisasi dari atas dan partisipasi dari bawah, dan peran pemimpin menjadi lebih tidak dominan, dengan tujuan akhirnya adalah pembagian kekuasaan.

Perkembangan tahap postmodern ditandai oleh munculnya gerakan-gerakan yang berasal dari dinamika internalnya sendiri. Protes muncul dalam berbagai konteks individu, tanpa kelompok atau fraksi dominan. Aksi dan aktivitasnya didasarkan pada kesadaran diri yang otonom sebagai tujuan akhir. (Von Beyme, 1996: 122). Hasil analisis Klaus Von Beyme ditampilkan dalam tabel berikutnya. Munculnya politik etnis dimulai dengan pertumbuhan kesadaran identitas kelompok etnis tertentu, yang kemudian menghasilkan solidaritas kelompok dan kebangsaan. Politik etnis merujuk pada upaya politik oleh kelompok etnis atau minoritas kecil. Dalam konteks politik kontemporer, fokusnya lebih sempit, dengan kelompok etnis atau minoritas seringkali tidak memiliki wilayah teritorial khusus. Tujuan mereka adalah perlindungan dan kemajuan kelompok, terutama bagi individu-individu di dalamnya, dalam negara yang sudah ada. (Kellas, (1988: 119).

## **5. Perkembangan Politik Identitas**

Munculnya politik etnis berawal dari peningkatan kesadaran yang mengidentifikasi individu sebagai anggota suatu kelompok etnis tertentu. Kesadaran ini memicu solidaritas dan rasa kebersamaan dalam kelompok, serta membangkitkan semangat kebangsaan. Politik etnis merujuk pada upaya politik yang melibatkan "kelompok etnis" dan "minoritas kecil", sedangkan konsep kelompok etnis (etnisitas nasional) bisa mengacu pada interpretasi yang lebih luas. Dalam konteks wacana politik kontemporer, nuansanya cenderung lebih terfokus.

Dalam konteks ini, potensi kelompok etnis sebagai sumber kekuatan untuk tindakan politik menjadi lebih jelas. Pemahaman ini membawa implikasi pada beberapa kecenderungan: Pertama, aspirasi untuk mendapatkan pengakuan yang setara dan hak-hak yang meliputi aspek politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Kedua, upaya untuk mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai budaya yang menjadi ciri khas dari kelompok tersebut. Terakhir, pengukuhan yang kuat terhadap identitas etnis yang dimilikinya.

Dibuat berdasarkan konteks teks yang diberikan. Gerakan politik identitas pada dasarnya membangun kembali "narasi bear" yang prinsipnya mereka tolak dan membangun suatu teori yang mengendalikannya factor- faktor biologi sebagai penyusun



perbedaan-perbedaan mendasar sebagai realitas kehidupannya. Dalam gerakan politik identitas ada suatu tendensi untuk membangun *system apartheid* terbalik. Ketika kekuasaan tidak dapat ditaklukkan dan pembagiaan kekuasaan tidak tercapai sebagai tujuan gerakan, pemisahan dan pengecualian diri diambil sebagai jalan keluar. Kelemahan dari gerakan politik identitas adalah upaya untuk menjadikannya sebagai dominasi dalam sebuah wadah atau bahkan keluar dari wadah disebut sebagai politik identitas. Tujuan sebenarnya dari politik identitas adalah mencapai kebaikan bersama.

## 6. Sejarah Perkembangan Politik Agama Di Indonesia

Sejarah mengabadikan bahwa tokoh-tokoh dalam komunitas dan institusi keagamaan memiliki potensi untuk berperan sebagai penjaga moral masyarakat dan juga sebagai kritikus terhadap kekuasaan yang otoriter. Agama memiliki daya energi yang luar biasa dalam memimpin perlawanan terhadap rezim yang korup dan despotik. Beberapa contoh dalam sejarah meliputi gerakan Gereja Katolik di Amerika Latin, gereja-gereja Black di Libya, atau tarekat Qadiriyyah Nasaqbandiyah di Banten, Indonesia. Meskipun sejarah mencatat mereka terlibat dalam kolonialisme, sebagian besar juga berperan sebagai kritikus dan pemberontak terhadap kolonialisme.

Sebagai contoh, Mahfudh (1901-1950) terlibat dalam perjuangan melawan penjajah dengan strategi yang efektif. Ia mendirikan laskar santri dan tergabung dalam Angkatan Oemat Islam (AOI). Pada zaman Orde Lama, Presiden Sukarno pada satu sisi mengakomodasi tokoh-tokoh dari kalangan Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Masyumi. Beberapa dari organisasi tersebut bahkan terlibat langsung dalam politik dengan mendirikan partai politik. Meskipun pada akhirnya, Soekarno mengeluarkan Keppres Nomor 200/1960 tanggal 15 Agustus 1960 yang membubarkan partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia, tetapi pembubaran tersebut diselenggarakan sedemikian rupa sehingga tidak memberi peluang apapun bagi perkembangan "Islam Politik", meskipun mendukung gerakan "Islam Kultural" yang bersifat apolitis.

Hal ini disusun berdasarkan konteks teks yang diberikan pada era reformasi, kebebasan berekspresi dan berserikat yang dulu ditutup rapat, kini pun dibuka kembali lebar-lebar, Indonesia menjadi bebas kemudian lahirlah partai-partai berbasis keagamaan, yang mengakomodasi kekuatan politik identitas mereka. Adanya peluang itulah yang mendorong timbulnya partai-partai politik baru di era reformasi. Di era ini, pertumbuhan partai-partai politik ibarat jamur di musim hujan. Menyongsong pemilu 1999 pemilu pertama era reformasi, 141 partai tercatat sebagai organisasi yang memiliki badan hukum partai politik dan tercatat di Departemen Kehakiman dan HAM. Dari 141 partai politik tersebut, orientasi dan politik keagamaan yang menjadi basis pendirian partai atas dasar gender, seperti partai keadilan sejahtera, partai bulan bintang, partai bintang reformasi.

## **7. Kekurangan dan Kelebihan Dari Perkembangan Politik Agama**

Kekurangan dalam politik agama terungkap melalui hasil penelitian Fox dan Menchik. Penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa poster kampanye yang menekankan simbolisme identitas memiliki karakter inklusif, seperti menampilkan simbol-simbol yang mencerminkan keragaman identitas di suatu wilayah. Namun, dalam konteks yang berbeda, mobilisasi elektoral kadang dilakukan dengan menghadirkan persaingan antara kelompok identitas, yang dapat memicu konflik. Hal ini seringkali digunakan sebagai alat dalam politik pragmatis, dan dapat mengakibatkan marginalisasi kelompok masyarakat lokal. Semua ini berkontribusi pada penguatan politik identitas. Simbolisme identitas sering kali digunakan untuk membenarkan tindakan kekerasan dan penindasan terhadap kelompok agama tertentu. Hal ini merupakan respons terhadap tindakan serupa di masa lalu, dan seringkali terjadi di tempat atau dengan kelompok sasaran yang sama. Tingkat kemampuan masyarakat dan Negara dalam mengelola keragaman beragama dari satu tempat ke tempat lain. Di banyak tempat ditemukan komunitas-komunitas dengan penduduk yang berbeda identitas tetapi mampu hidup secara berdampingan (koeksisten) dalam kurun waktu yang lama. Namun sayangnya tidak cukup ada upaya untuk menjelaskan, mempublikasikan dan mentransfer kemampuan satu masyarakat dalam mengelola keragaman ke tempat lain sehingga potensi kekerasan di wilayah-wilayah yang rentan bisa antar atau intra agamatidak terbatas pada masalah hukum dan perbedaan keagamaan, tetapi juga sebagai masalah ketatanegaraan dan sosial.

Kelebihan dari politik agama adalah perbedaan keagamaan semata bukanlah faktor penentu dalam konflik, begitu juga meski regulasi dan penegakkan hukum di butuhkan, pendekatan hukum perlu diperkuat oleh proses “rekayasa sosial” yang mendukung situasi koeksistensi atau kerukunan. Sehingga peran pemerintah sangat diperlukan untuk menciptakan kerukunan.

## **8. Politik Identitas Ancaman Dalam Bernegara**

Identitas sering kali dianggap sebagai hasil dari sistem kepercayaan individu dan afiliasi sosialnya. Berbagai faktor dapat membentuk identitas, termasuk aspek ras, kebangsaan, agama, lokasi tempat tinggal, serta jenis kelamin dan orientasi seksual individu. Di sisi lain, politik identitas umumnya berkaitan dengan afiliasi dalam kelompok tertentu dan menjelaskan bagaimana menjadi anggota kelompok tersebut dapat memengaruhi pandangan politik dan sikap individu. Politik identitas juga sering terhubung dengan afiliasi partai politik tertentu atau identifikasi partisan. Bagi banyak pemilih, pemilihan partai politik bukan sekadar tentang memberikan suara, tetapi seringkali melibatkan pertarungan politik, seperti yang terjadi di Indonesia.

Sejarah dunia mencatat bahwa politik identitas sering kali dibentuk oleh faktor ras dan aliran ideologi agama tertentu. Faktor lain yang mungkin membentuk politik identitas adalah ketidaksetaraan kelas yang didasarkan pada faktor ekonomi. Misalnya, minat, harapan, atau pandangan hidup seseorang seringkali dipengaruhi oleh situasi ekonomi mereka sendiri. Sebagai contoh, meskipun pekerja pabrik mungkin beragam dalam banyak

hal, mereka memiliki pengalaman dasar yang sama sebagai pekerja pabrik, yang mengakibatkan kesamaan minat, tantangan, dan tujuan di antara mereka. Hal serupa berlaku untuk manajer, petani, perawat, guru sekolah menengah, dosen, atau profesor di universitas. Semua kelompok ini memiliki persamaan dalam hal minat, kesulitan, dan tujuan yang mereka hadapi dalam profesi masing-masing.

## **9. Perkembangan Politik Identitas di Dunia**

Apa yang kita kenal sebagai politik identitas pada hakikatnya dimulai dengan sejarah perkembangan gerakan sosial pada tahun 1960-an. Gambaran ini muncul ketika terjadi serangkaian tuntutan dari berbagai kelompok yang sebelumnya terpinggirkan, termasuk orang Afrika-Amerika, perempuan, kaum gay dan lesbian, serta kelompok minoritas lainnya. Tuntutan-tuntutan ini melibatkan permintaan pengakuan martabat dan upaya nyata untuk mengatasi kerugian sosial yang mereka alami. Seiring berjalannya waktu, tuntutan-tuntutan ini mengalami perkembangan untuk menggantikan perhatian terhadap kelas sosial-ekonomi, yang sebelumnya sering menjadi fokus tradisional dalam pemikiran kiri mengenai ketidaksetaraan. Tuntutan ini merefleksikan keluhan yang sangat penting, tetapi dalam beberapa kasus, kelompok-kelompok ini mulai mengambil karakter yang eksklusif. Dalam hal ini, pengalaman hidup individu dapat menentukan eksistensi yang spesifik bagi kelompoknya. Namun, hal ini dapat menciptakan hambatan dalam membangun empati dan komunikasi, karena bisa mendorong terbentuknya eksklusivitas.

Saat ini, dunia berada dalam fase di mana politik identitas telah bergerak ke kanan. Ada beberapa faktor yang berkonspirasi untuk menghasilkan gelombang populisme yang muncul di Eropa dan Amerika Serikat. Yang satu berkaitan dengan globalisasi dan dampaknya yang sangat tidak setara pada populasi negara maju. “Outsourcing” dan perubahan teknologi tidak hanya berdampak pada pendapatan kelas pekerja tetapi juga menyebabkan penurunan sosial yang luas yang dianggap sebagai faktor pendorong hilangnya sebuah status. Disinilah awal mulanya muncul definisi politik identitas dalam arti luas dengan melibatkan individu yang mendasarkan identitasnya pada kategori dan divisi sosial. Beberapa contoh adalah seorang feminis yang selalu memilih calon perempuan terlepas dari kebijakan, atau orang kulit hitam yang terutama mendukung penyebab yang dirancang untuk memberdayakan komunitas kulit hitam.

Akhir abad ke-20 mengalami peningkatan dalam politik identitas ketika ketidakadilan sosial dan ketidaksetaraan menjadi diakui secara luas. Gerakan-gerakan politik dan sosial yang besar menyebabkan gagasan bahwa individu lebih rentan terhadap kemiskinan, kekerasan dan marjinalisasi berdasarkan etnis, gender dan divisi sosial lainnya. Politik identitas melibatkan dan merangkul divisi-divisi ini sebagai bagian penting dari identitas, yang berarti bahwa identitas seseorang tentu dipolitisasi oleh kategori sosial yang menjadi miliknya. Politik identitas banyak dikritik karena sering melibatkan asumsi bahwa seluruh kelompok memiliki kebutuhan dan kepentingan yang sama. Fakta bahwa Barack Obama memenangkan 95 persen suara hitam dalam pemilihan presiden 2008 telah

dikritik dari beberapa sudut pandang berbeda.

Gagasan bahwa pemilih kulit hitam mendukung Obama terlepas dari politiknya sebagian besar tidak berdasar, karena kandidat presiden dari Partai Demokrat telah memenangkan mayoritas suara hitam di hampir setiap pemilihan. Namun, politik identitas bisa jadi bertanggung jawab untuk tingkat dukungannya yang lebih kecil di antara komunitas kulit hitam. Sisi positif dari politik identitas adalah bahwa mereka sering rasional. Misalnya, asumsi bahwa seorang politisi perempuan akan mendukung kepentingan perempuan secara statistik akurat. Selain itu, dukungan untuk tujuan politik yang memberdayakan masyarakat sosial biasanya menguntungkan individu. Contohnya adalah kemajuan hak-hak minoritas yang dapat menguntungkan individu yang diidentifikasi dengan pembagian sosial itu dalam berbagai cara.

Selanjutnya tugas kita adalah menerjemahkan nilai-nilai luhur Pancasila itu ke dalam kenyataan kehidupan yang kongkret, sesuatu yang masih jauh dari harapan kita semua. Dalam konstitusi, yakni Pancasila yang menjadi sumber legitimasi dan kriteria terakhir keabsahan suatu kekuasaan di negeri kita. Artinya, sebuah bangunan kekuasaan di luar Pancasila, menurut CN, menjadi tidak sah. Tetapi harus diingat bahwa Pancasila tidak boleh terpasung oleh kekakuan penafsiran. Pancasila harus menjadi "ideologi terbuka dan tidak mungkin dibuatkan penjabarannya sekali untuk selama-lamanya". Saya rasa, bukan saja Pancasila yang harus membuka diri bagi penafsiran bagi agama manapun, yang diyakini berasal dari Allah, harus membuka diri untuk ditafsir ulang. Penafsiran ulang inilah sebenarnya hakikat dari kerja ijtihad, demi menjawab masalah masalah zaman yang terus berubah. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila harus menghindari diri dari penafsiran monolitik. diperlukan sikap yang lebih proaktif, "terhadap nilai-nilai Pancasila" itu, yaitu usaha mengetahui dan menghayati apa sebenarnya yang dikehendaki oleh nilai-nilai luhur itu, dengan keberanian mengadakan 'pengusutan' kepada keadaan sekarang. jika boleh saya simpulkan, bagi cita-cita keislaman dan cita-cita keindonesiaan bertemu dalam Pancasila sebagai ideologi terbuka yang harus ditafsirkan secara "proaktif." Dengan semangat Sumpah Pemuda dan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dimensi negatif politik identitas yang bermuatan agama, etnisitas, dan ideologi, akan dapat dikawal dan diarahkan, demi mem per kokoh semangat integrasi nasional, sesuatu yang mutlak bagi masa depan Indonesia sebagai bangsa dan negara. Kebesaran terutama terletak pada keberaniannya yang luar biasa untuk "menyimpang" dari para pendahulunya dalam menyikapi Pancasila sebagai dasar filosofi Negara, umat Islam tidak perlu lagi berangan-angan untuk mengganti Pancasila dengan dasar lain. Gebrakan ini telah mengundang sikap pro-kontra yang cukup.

#### **D. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Manusia adalah makhluk sosial yang bergantung pada interaksi dengan sesamanya untuk bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan. Setiap individu memiliki keinginan untuk meraih kesejahteraan, meskipun definisi kesejahteraan dapat bervariasi dari satu individu ke individu lainnya. Karena posisi dan sumber daya tidak terbatas, persaingan untuk mencapai kesejahteraan juga menjadi hal yang lumrah. Dalam konteks ini, politik menjadi relevan karena menjadi sarana untuk mencapai tujuan dan kesejahteraan. Politik melibatkan upaya

untuk menduduki posisi dan memiliki kewenangan dalam mengatur sistem pada skala yang lebih besar, dengan tujuan mencapai kepentingan dan cita-cita tertentu. Politik bisa menjadi alat untuk mengorganisasi dan mengarahkan masyarakat menuju berbagai tujuan.

Politik dapat dijumpai dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari dan beroperasi pada berbagai tingkatan dalam masyarakat. Baik dalam interaksi sosial, dalam organisasi, dalam struktur pemerintahan, maupun dalam pengambilan keputusan kolektif, unsur politik selalu ada karena manusia berusaha mengelola sumber daya dan mencapai tujuan melalui dinamika kekuasaan dan pengaruh. Realitas masyarakat Indonesia yang multikultural menunjukkan pentingnya mengadopsi falsafah hidup yang mencerminkan keberagaman ini. Keberagaman suku, bangsa, agama, bahasa, dan identitas lainnya seharusnya menjadi kekayaan yang menyatukan warga negara, bukan malah memperkuat politik identitas berbasis kebencian. Pandangan bahwa Tuhan menciptakan manusia dalam keberagaman untuk saling mengenal dan hidup bersama dengan damai memainkan peran penting dalam menjaga harmoni sosial.

Namun, tantangan muncul ketika semangat multikulturalisme melemah. Ini mengingatkan kita, sebagai bangsa yang memiliki semangat bhineka (beraneka) dan toleransi, untuk mengembalikan dan memperkuat semangat ini. Kita harus membuktikan identitas kita sebagai bangsa yang damai, toleran, dan mampu hidup berdampingan meskipun dalam keragaman. Semangat dan komitmen terhadap multikulturalisme dapat membantu masyarakat membangun ikatan yang kuat melintasi batas-batas kelompok dan identitas, serta mempromosikan harmoni dan kerjasama yang lebih luas. Politik identitas, dengan indikasi menguatkan identitas diri sembari menyerang pihak lain yang berbeda identitas, bukanlah merupakan jati diri bangsa Indonesia. Selama berabad-abad lamanya, bangsa Indonesia telah membuktikan sebagai bangsa multikulturalis. Jikalau ada insiden, itu hanyalah letupan dan riak kecil yang akan mudah diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdilah S, Ubed. 2002. Politik Identitas Etnis: Pergulatan Tanda Tanpa Identitas. Magelang: Yayasan Indonesiatera.
- Baswedan, A. (2004). Political Islam in Indonesia. Asian Survey Vol. 5, hal. 669-690.
- Beyme, Klaus Von. 1996. Federalism, Democracy, And The Politics Of Identity. University of Heidelberg.
- Fox, Colm dan Menchik, Jeremy. 2011. The Politics of Identity in Indonesia: Results from Campaign Advertisement, APSA 2011 Annual Meeting Paper.
- Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hefner, Robert W. 2007. Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan. Yogyakarta: Impulse.
- Heller, Agnes dan Punsher, Sonja. 1995. Biopolitical Ideologies an their Impact on the New Social Movements. A New Handbook of Political Societies. Oxford, Blackwell.
- James G. Kellas, 1988, The Politics of Nationalism and Ethnicity, edisi II, New York: ST Martin's Press.
- Lipset SM & Rokkan S. 1967. Cleavage structures, party systems, and voter alignments: an introduction. New York: Free Press. p. 1- 64.
- Mahasin, Aswab. 1981. Abangan, Santri, Priyayi dalam Masyarakat Jawa. Bandung: Dunia Pustaka Jaya.
- Sumanto, Al Qurtuby. 2016. Agama, Politik, dan Politik Agama. <http://www.dw.com>. diakses pada 11 Maret 2016.
- Pramana, Gede Indra. 2015. Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 2, Juli 2015.
- Widayanti, Titik. 2009. Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria. Yogyakarta: UGM.
- Gaffar, Afan. 1999. Politik Indonesia, Transisi Menuju Demokrasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hefner, Robert W. 2007. Politik Multikulturalisme: Menggugat Realitas Kebangsaan. Yogyakarta: Impulse.
- Heller, Agnes dan Punsher, Sonja. 1995. Sumanto, Al Qurtuby. 2016. Agama, Politik, dan Politik Agama. <http://www.dw.com>. Diakses pada 16 Agustus 2019.
- Pramana, Gede Indra. 2015. Politik Aliran di Bali Pasca Soeharto. Jurnal Ilmu Pemerintahan Volume 8, Nomor 2, Juli 2015.
- Widayanti, Titik. 2009. Politik Subalter: Pergulatan Identitas Waria. Yogyakarta: UGM.